

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini tuntutan terhadap terwujudnya *good corporate governance* di setiap sektor publik maupun sektor swasta baik di negara-negara internasional maupun Indonesia semakin penting saja. Hal ini wajar karena sebagian besar krisis yang terjadi di Asia merupakan dampak dari *bad governance* pelaku-pelaku ekonomi. Collapse-nya beberapa perusahaan besar di negara-negara maju seperti BCCI, UK (1988); Bank Barings, UK(1996); Enron Corp., US(2002).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia, salah satu penyebab krisis yang melanda Asia termasuk Indonesia terutama di tahun 1998-an adalah bahwa negara-negara tersebut masih lemahnya kemampuan manajemen dalam mengimplementasi *good corporate governance*. Rendahnya mutu dari penerapan *corporate governance* sangat mempengaruhi kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Alijoyo et al (2004), lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia tercermin pada defisiensinya pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan. Keputusan itu menyebabkan profit yang tidak maksimal, tidak mampu bersaing dalam bisnis dan tidak mampu memnuhi kepentingan *stakeholders*.

Berdasarkan McKinsey Investor Opinion Survey (1999-2000), Indonesia merupakan negara yang terburuk dalam menerapkan *good corporate governance* di Asia. Selain itu, berdasarkan Hasil Survey Political and Economic Risk Consultancy, Indonesia merupakan negara dengan tingkat KKN paling tinggi se-Asia. *Good corporate governance* dianggap penting karena diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan yang terpuruk, mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan. Sehingga setiap organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Corporate governance merupakan suatu konsep yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia atau FCGI, *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak *stakeholder* dalam hal ini adalah pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. tujuan dari definisi tersebut adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Dalam penelitian Lehn, Patro, dan Zhao (2006), kinerja yang menyebabkan perusahaan menerapkan GCG. Peneliti lain Ashbaugh, Collins, dan LaFond (2006) menemukan bahwa perusahaan dengan *Corporate governance* yang kuat ternyata memiliki *credit rating* yang tinggi dibandingkan dengan *Corporate governance* yang lemah. Sehingga perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* diharapkan akan memiliki kinerja yang lebih baik.

Dalam melaksanakan *corporate governance*, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Fungsi dari dewan komisaris adalah sebagai suatu sistem yang mengawasi mekanisme manajemen, dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan sehingga dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International, 2000).

Dewan komisaris terbagi dua, yaitu komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan (komisaris independen). Dalam hal ini, komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali.

Setelah diberlakukan ketentuan mengenai adanya keharusan perusahaan mengangkat komisaris independen di perusahaan publik, hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan sebagai penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik. Komisaris independen memegang peranan yang cukup berpengaruh karena komisaris independen memiliki tanggung jawab secara hukum, karena biasanya dalam praktik, banyak kecenderungan bahwa komisaris sering melakukan intervensi kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Agar salah satu individu dalam dewan komisaris memiliki kekuasaan yang mutlak, maka digunakan perimbangan dengan keberadaan komisaris independen atau komisaris ekstern.

Di Indonesia sendiri, keberadaan komisaris independen sudah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000, bahwa untuk perusahaan yang listing di BEI harus mempunyai jumlah komisaris independen 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Menurut Gilson (1990) dan Kaplan dan Reishus (1990) mengemukakan pentingnya *board of directors* yang berasal dari luar perusahaan. Hal ini akan mengurangi tindakan kolusi dengan manajemen

Untuk meningkatkan efektifitas dari dewan komisaris, maka dewan komisaris mengadakan rapat untuk membagi informasi diantara sesama anggota komisaris. Seperti yang disebutkan oleh Conger *et al* (1998) bahwa rapat *board of directors* merupakan salah satu sumber informasi yang nantinya digunakan untuk meningkatkan efektifitas dewan komisaris. Informasi yang diungkapkan melalui rapat tersebut meliputi tidak hanya pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, pengendalian internal tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (1999) ditemukan hubungan positif antara frekuensi rapat dengan kinerja perusahaan. Hal ini juga dikemukakan oleh Perry (1996), aktivitas dewan komisaris mengukur kualitas dari peran monitoring-nya. Semakin aktif dewan komisaris, maka kinerja perusahaan juga akan semakin efektif. Selain itu

kehadiran dari anggota komisaris juga menjadi tolok ukur efektif tidaknya kinerja dewan komisaris.

Remunerasi dalam perusahaan merupakan hal yang penting. Dalam perumusan formulanya juga tidak boleh sembarangan. Dalam penetapannya pun juga mempertimbangkan kondisi lingkungan, dan kondisi keuangan perusahaan, yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Greenbury (1995) dalam penelitiannya menganalisis jumlah yang dibayar perusahaan kepada eksekutif, tentang remunerasi dan juga kepada komite audit. Sistem penggajian komisaris dan direktur dalam perusahaan tentu tidak lepas dari ruang lingkup pekerjaan, pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi, dan komitmen waktu dari komisaris. Terutama pada saat kondisi perusahaan tidak baik, maka remunerasi dapat digunakan sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja dari dewan komisaris. Sehingga diharapkan dengan remunerasi yang tinggi, kinerja dewan komisaris dalam perusahaan akan semakin baik, sehingga menaikkan nilai perusahaan.

Penelitian ini ingin memfokuskan pada total remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris. Target pencapaian komisaris, dikaitkan dengan rekomendasi serta fungsi pengawasan dalam menjalankan perusahaan. Menurut Bertrand dan Mullainathan (2001), total kompensasi memiliki efek yang lebih sensitif dengan kinerja perusahaan, perusahaan yang memiliki struktur *corporate governance* yang kuat, cenderung memiliki tingkat sensitif yang besar juga di bidang kompensasi.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara nilai suatu perusahaan dengan independensi, aktivitas dari dewan komisaris juga remunerasi yang. Dewan komisaris sebagai pihak yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pemberi nasihat bagi direksi dan memastikan perusahaan. Sehingga dewan komisaris ini telah mengimplementasi *good corporate governance* dalam kata lain apabila dewan komisaris melaksanakan tugasnya dengan baik maka diharapkan akan berdampak pada harga saham secara keseluruhan.

1.2. Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini memfokuskan pada pengaruh karakteristik dewan komisaris mengenai independensi, kompetensi dan aktivitasnya di perusahaan terhadap kinerja dari perusahaan seluruhnya. Secara spesifik, permasalahan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris di Indonesia mengenai:

1. Apakah dewan komisaris yang independen akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah frekuensi rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah remunerasi dewan komisaris akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris di Indonesia mengenai:

1. Mengetahui pengaruh dan hubungan dewan komisaris yang independen terhadap terhadap nilai perusahaan?
2. Mengetahui pengaruh dan hubungan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap terhadap nilai perusahaan?
3. Mengetahui pengaruh dan hubungan remunerasi dewan komisaris terhadap terhadap nilai perusahaan?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan bagi *stakeholder* tentang pentingnya peranan dari dewan komisaris terhadap nilai dari perusahaan.
2. Memberikan tambahan literatur mengenai dewan komisaris pada tata kelola perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi para akademisi, pihak regulator, para investor dan juga pihak lainnya.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian empiris dimana objek penelitian merupakan perusahaan listing di BEI. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan periode 2007. Untuk data nilai perusahaan, peneliti memperolehnya dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah melaksanakan GCG.

Dalam membahas pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang listing di BEI, penulis akan menggunakan SPSS (analisis regresi).

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan karya akhiri ini akan terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan motivasi penelitian, rumusan permasalahan dari hubungan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tinjauan literature mengenai *corporate governance*, antara lain pengertian dari dewan komisaris, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dewan komisaris seperti independensi, aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan sistem remunerasi yang dijalankan oleh perusahaan serta dampaknya bagi nilai perusahaan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun model penelitian, pengembangan hipotesis yang akan diuji, mengungkapkan secara eksplisit model penelitian dan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian, hipotesis penelitian dan hasil pengujian yang diharapkan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode pengumpulan data populasi dan pengambilan sample, metode pengolahan data dan

metode analisis yang digunakan. Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis hasil penelitian, termasuk analisis sensitivitas dari model penelitian yang telah disusun. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implikasi hasil penelitian bagi pengawas pasar modal, investor dan emiten.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari analisis hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

